



RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016**

**PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**
September 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah- Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016.

Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 lebih diarahkan sebagai wujud implementasi terhadap Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB 2013 – 2018. Lebih jauh bahwa keberadaan Rencana Kerja sebagai penjabaran dan tahapan proses dalam pencapaian visi dan misi Bappeda Provinsi NTB.

Secara umum, Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 ini berisikan informasi mengenai program kerja, kegiatan disertai indikator hasil dan manfaat yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2015 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB 2013 – 2018. Di sisi lain, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan yang direncanakan selama tahun 2016. Hal ini diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kerja tahun 206.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Bappeda Provinsi NTB.

Mataram, September 2015
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



CHAIRUL MAHSUL
NIP. 19591002 198503 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penyusunan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD	7
	2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2014	7
	2.1.2 Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2015	15
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	26
	2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD	28
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	35
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	36
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD	38
	3.3. Program dan Kegiatan	41
BAB IV	PENUTUP	50
	4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	50
	4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	50
	4.3. Rencana Tindak Lanjut	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014	10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Sampai dengan Tahun berjalan (30 September 2015)	18
Tabel 2.3	Review Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2016 Terhadap Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016	30
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jagka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat	40
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan suatu proses dan upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dari kondisi sekarang. Agar pembangunan tersebut mencapai hasil yang diinginkan diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang matang dan terpadu, mencakup semua aspek yang terkait dengan perencanaan itu sendiri.

Dalam era sentralisasi, perencanaan pembangunan daerah sifatnya hanya sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional, sehingga peranan perencanaan pembangunan daerah tidak terlalu penting. Akan tetapi dalam era otonomi, orientasi perencanaan pembangunan daerah mengalami perubahan dan peranannya menjadi semakin penting disusun dengan lebih memperhatikan potensi yang ada secara optimal dengan tidak mengabaikan kelestarian alam dan lingkungan. Dengan demikian, perlu adanya perumusan strategi melalui implementasi sistem perencanaan yang komprehensif dan sistematis.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 8 ayat (1) tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dalam ayat (2) Bappeda menyelenggarakan fungsi (a) perumusan kebijakan teknis perencanaan, (b) pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, (c) pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan.

Disamping tugas dan fungsi Bappeda bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 27 ayat (1) menyebutkan setiap SKPD harus menyusun Renja-SKPD sedang dalam ayat (2) Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan

awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bappeda Provinsi NTB dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Bappeda Provinsi NTB dituntut untuk siap dan sanggup untuk membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 didasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2016, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Renja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2013-2018. Dengan demikian, Renja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 adalah pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Provinsi NTB tahun 2016 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Provinsi NTB khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018.
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015;
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;

- b. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPDP Provinsi NTB Tahun 2016;
- c. Sebagai acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2016.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 adalah agar dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Provinsi NTB, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2014

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi NTB
- 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi NTB
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPDP
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

- 4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
- 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2014

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016, sangat diperlukan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2014, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun terakhir yang diselaraskan dengan kegiatan pada tahun berjalan. Hal ini akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan yang diikuti dengan program, kegiatan serta penganggaran.

Proses perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan lancar mulai dari rapat kerja kepala Bappeda Provinsi dengan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se NTB, Forum SKPD, Pra Musrenbang Provinsi, Musrenbang Provinsi, Pra Musrenbang Nasional dan Musrenbang Nasional, sampai penyusunan KUA PPAS dan RKA serta DPA SKPD. Selain dokumen perencanaan dan dokumen anggaran, tugas-tugas perencanaan lainnya juga telah terlaksana dengan baik, antara lain Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPj), Buku NTB Dalam Angka, Buku Data Pokok, Buku PDRB, serta study lainnya yang mendukung proses perencanaan dalam mendukung perwujudan sasaran dan tujuan RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan dalam perencanaan meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB, sehingga rencana pembangunan dan aspirasi masyarakat dapat terfasilitasi dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Program-program strategis dalam rangka mendukung kepentingan masyarakat diupayakan memiliki unsur-unsur percepatan, inovasi dan nilai tambah. Apresiasi Pemerintah Pusat terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Provinsi NTB ditunjukkan dengan diberikannya penghargaan tingkat nasional yaitu Pangripta Nusantara, MDGs, dan inovasi daerah dalam pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2014 berhasil meraih Anugerah Pangripta Nusantara Utama terbaik III sebagai penghargaan tertinggi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi di bidang dokumen perencanaan pembangunan, menyusul penghargaan yang sama diraih pada tahun

2013 dengan 2 penilaian utama meliputi penilaian substantif dokumen perencanaan dan prosedur tahapan perencanaan. Adapun penilaian substantif dokumen perencanaan meliputi :

1. Konsistensi perencanaan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah
2. Konsistensi perencanaan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya
3. Keterukuran/kedalaman materi perencanaan pembangunan, dan
4. Inovasi proses perencanaan serta kebijakan/program pembangunan.

sedangkan untuk penilaian prosedur tahapan perencanaan meliputi :

1. Pendekatan *top down – bottom up planning*
2. Proses perencanaan teknokrasi
3. Proses perencanaan politis
4. Partisipasi masyarakat

Ditahun yang sama Provinsi NTB memperoleh penghargaan MDGs sama dengan tahun 2013 yang lalu diserahkan oleh Presiden RI kepada Gubernur NTB, yakni :

1. Terbaik I kategori Laju Pencapaian MDGs Terbaik Tahun 2011-2013
2. Provinsi Terbaik Dengan Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak 2011-2013.

Jumlah dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional pada tahun 2014 ditargetkan 3 dokumen. Dokumen yang diajukan ketingkat nasional meliputi dokumen perencanaan MDGs, dokumen RKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan, keterlibatan para pihak yang memiliki potensi dan sumberdaya menjadi sangat penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi NTB. Kerjasama yang telah dilakukan antara lain dalam bentuk pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana serta penyusunan dokumen. Kerjasama yang telah diselenggarakan antara lain dalam bentuk :

1. Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB dengan *Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ)/Regional Economic Development Program (RED)*, dalam rangka pelatihan pengembangan desain bagi para desainer, pendampingan penyiapan partisipasi pada pameran dagang dengan konsep inovasi kerajinan, pendampingan pembentukan dan pengelolaan kelompok usaha/koperasi usaha, pembenahan pelayanan kantor pelayanan perijinan terpadu, pelatihan pengembangan ekonomi lokal bagi SKPD terkait (Provinsi, Kota Mataram dan Lombok Barat), pelatihan "*capacity work*" bagi *counterpart* GIZ RED, pelatihan website produk gerabah bagi pengrajin dan pengurus Koperasi Pasar Seni di Banyuwilek, penguatan kepariwisataan berkelanjutan, dan penguatan kaitan antar sektor pariwisata dengan pertanian.

2. Kerjasama antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi NTB, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dalam rangka penelitian, penyidikan dan pengembangan kawasan budidaya dan lindung geologi. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain : sosialisasi Geopark Rinjani-Lombok melalui workshop dan seminar, pengiriman Dossier Rinjani sebagai Geopark Dunia ke UNESCO dan penyebaran informasi Geopark Rinjani-Lombok melalui signboard pada geosite.
3. Nota Kesepahaman antara Lembaga Wali Amanat *Millenium Challenge Account* – Indonesia, Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau dengan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2014 antara lain fasilitasi rapat koordinasi ditingkat Provinsi dan fasilitasi penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Pajak Daerah.
4. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi NTB. Dari perjanjian ini Pemerintah Daerah menyediakan dana sharing untuk membiayai peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan pengelolaan irigasi partisipatif yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2014 adalah rapat koordinasi dan sinkronisasi WISMP II, rapat koordinasi PPMU dan PPIU, kegiatan PSETK, dan pelatihan TPM program WISMP II.
5. Kerjasama antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi NTB dengan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, dalam rangka pengelolaan Pusat Data Daerah "Bale Ite" Provinsi NTB dengan ruang lingkup kerjasama untuk mendukung Pusat Data Daerah antara lain : operasional pelayanan untuk umum, pembiayaan terhadap operasional dan kegiatan, pelaporan pelaksanaan operasional.

Selain hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB terus bersinergi dengan lembaga NGO termasuk United Nations International Childrens Emergency Fund (UNICEF) dalam implementasi program, fokus pada perlindungan anak, air dan sanitasi/penyehatan lingkungan. Dukungan program UNICEF tahun 2014 untuk daerah NTB antara lain :

1. Penyusunan draft Raperda Pemerataan Akses Air Bersih di NTB, diharapkan mampu mengatasi permasalahan air bersih/air minum di daerah NTB.
2. Workshop sistem monitoring dan evaluasi program air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL).

Bappeda Provinsi NTB pada tahun 2014 menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan dengan melaksanakan 6 program pokok dan 20 kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
				URAIAN	TARGET	REALISASI
1	Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Data/Informasi	Menyusun Profil Daerah	Peta sosial berbasis WEB di Prov. NTB yang tersedia	10 Desa	10 Desa
2.	Kerjasama Pembangunan	Meningkatkan efektivitas Kerjasama pembangunan	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga	Buku Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2013 yang dicetak	200 buku	200 buku
				Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB Tahun 2013 yang dicetak	200 buku	200 buku
				Indek Pembangunan Regional Prov. NTB Tahun 2013 yg disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
				Tabel Input-Output Provinsi NTB Tahun 2014 yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
				Analisis Tingkat Kemiskinan dan Karakteristik Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2013 yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
				Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB tahun 2013 yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
				Indeks Pembangunan Gender Provinsi NTB Tahun 2013 yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
				Kajian Nilai Tukar Petani di Provinsi NTB Tahun 2013 yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
3.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Daerah	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public	Laporan hasil Rapat Kerja Bappeda Kab/kota se NTB yang dicetak	15 buku	15 buku
				Laporan hasil Forum SKPD Provinsi NTB yang dicetak	15 buku	15 buku
				Laporan pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi NTB yang dicetak	15 buku	15 buku
				Peserta Bimtek proses penyusunan LAKIP SKPD	75 orang	75 orang
				Peserta Workshop Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta	90 orang	90 orang

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
				URAIAN	TARGET	REALISASI
			Penyusunan rancangan RKPD	Buku RKPD Provinsi NTB Tahun 2013 yang dicetak	75 buku	75 buku
			Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Rencana Pembangunan Daerah yg disusun	1 dokumen	1 dokumen
				Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi NTB Tahun 2015 yang dicetak	15 Buku	15 Buku
				Bahan Musrenbang-nas yang disusun	25 Buku	25 Buku
				Peserta Musrenbang RKPD Provinsi NTB Tahun 2015	650 Orang	650 Orang
			Koordinasi penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah	Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013 yang dicetak	20 buku	20 buku
			Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	Buku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2013 yang dicetak	200 Buku	200 Buku
		Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah		Dokumen Evaluasi UKP-PPP Tahun 2014 (4 triwulan) yang dicetak	60 buku	60 buku
				Dokumen Evaluasi Capaian Program Prioritas RPJMD 2013 - 2018 Semester I dan II yang dicetak	60 buku	60 buku
				Dokumen Progress Report Kinerja Program Unggulan NTB Semester II Tahun 2013, Kinerja RPJMD NTB 2014 - 2018 (Triwulan I,II,III Tahun 2014) yang dicetak	60 buku	60 buku
		Penyusunan rancangan KUA dan PPAS		Dokumen KUA Perubahan TA 2014 yang dicetak (draft awal, akhir & final @75 buku)	225 Buku	225 Buku
				Dokumen PPAS Perubahan TA 2014 yang dicetak (draft awal, akhir dan final @75 buku)	225 Buku	225 Buku
				Dokumen KUA TA 2015 yang dicetak (draft awal, akhir dan final @75 buku)	225 Buku	225 Buku
				Dokumen KUA TA 2015 yang dicetak (draft awal, akhir dan final @75 buku)	225 Buku	225 Buku

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
				URAIAN	TARGET	REALISASI
				Dokumen PPAS TA 2015 yang dicetak (draft awal, akhir dan final @75 buku)	225 Buku	225 Buku
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Buku Laporan Tahunan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013 yang dicetak	20 Buku	20 Buku
				Dokumen Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2015 yang dicetak	20 Buku	20 Buku
				DPPA Bappeda Provinsi NTB TA 2014 yg dicetak	20 Buku	20 Buku
				DPA Bappeda Provinsi NTB TA 2015 yg diceta	20 Buku	20 Buku
				Dokumen Penyelarasan RPJMD 2014 - 2018 dengan Rencana Strategis (Resntra) Bappeda Provinsi NTB Tahun 2014 - 2018 yang diselaraskan	20 Buku	20 Buku
				Sosialisasi / publikasi perencanaan pembangunan daerah	Sosialisasi/publikasi melalui media cetak (Lombok Post)	1 kiai
				Sarana dan prasarana sosialisasi/publikasi yang diadakan : - Spanduk - Baliho - Umbul-umbul - Bendera merah putih uk.200 x 130 cm. - Bendera merah putih uk.100 x 60 cm. - Gapura kegiatan 17 Agustus	46 buah 15 Buah 25 Buah 4 Buah 50 Buah 1 Kegiatan	46 buah 15 Buah 25 Buah 4 Buah 50 Buah 1 Kegiatan
			Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Peserta kabupaten/kota sosialisasi Perda No 2 Tahun 2014 tentang RPJMD 2013 - 2018	20 Orang	20 Orang
				Peserta provinsi sosialisasi Perda No 2 Tahun 2014 tentang RPJMD 2013 - 2018	60 Orang	60 Orang
				Sistem Aplikasi RKPD Online yang tersedia	1 software/aplikasi	1 software/aplikasi
			Sinkronisasi dokumen RPJMD Provinsi NTB	Renstra SKPD yang telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi NTB	44 dokumen	44 dokumen
				RPJMD Kab/Kota yang telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi NTB	3 kab/kota	3 kab/kota

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
				URAIAN	TARGET	REALISASI
				Laporan pelaksanaan sinkronisasi RPJMD Provinsi NTB dengan RPJMD Kab/Kota yang dicetak	10 buku	10 buku
				Laporan pelaks. sinkronisasi RPJMD Provinsi NTB dgn Resntra SKPD Prov. NTB yang dicetak	10 buku	10 buku
4	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Ekonomi	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Buku saku database bidang Ekonomi yang dicetak	600 Buku	600 Buku
				Booklet Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dicetak	300 eksemplar	300 eksemplar
				Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) yang dicetak	10 Buku	10 Buku
				Laporan tahunan DBHCHT Provinsi NTB yang dicetak	10 Buku	10 Buku
				Peserta rakor penanggulangan kemiskinan	120 orang	120 orang
				Peserta rapat DBHCHT	90 orang	90 orang
				Peserta rapat subdit Pertanian & Kelautan	200 Orang	200 Orang
				Peserta rapat penyusunan buku saku database bidang ekonomi	40 orang	40 orang
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Database indikator capaian target MDGS di Provinsi NTB yang dicetak	25 buku
			Laporan tahunan pencapaian MDGs di Provinsi NTB yang dicetak		25 buku	25 buku
			Dokumen Rencana Pengembangan Ekonomi NTB 2014 - 2018 yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen
			Peserta Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Provinsi NTB		30 orang	30 orang
			Peserta Rakor PNPM PISEW		50 orang	50 orang
			Peserta Rakor Penyusunan Rencana SKPD tentang MDGs		60 orang	60 orang
			Peserta rapat tahunan pencapaian MDGs		30 orang	30 orang
			Peserta rapat PNPM PISEW		60 orang	60 orang

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
				URAIAN	TARGET	REALISASI
				Peserta rakor kegiatan industri dan keuangan	40 orang	40 orang
				Peserta rapat kegiatan evaluasi capaian indikator MGDs	60 orang	60 orang
				Peserta rapat Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)	60 orang	60 orang
				Peserta Rapat Forum Bumdes	60 orang	60 orang
5	Perencanaan sosial budaya	Meningkatnya Kualitas Rencana sosial dan budaya	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Peserta rapat bidang Pemerintahan	200 Orang	200 Orang
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra	Dokumen evaluasi Kinerja Gerakan 3A yang dicetak	10 Buku	10 Buku
				Map bidang Perencanaan Pembangunan Sosial yang dicetak	250 buah	250 buah
				Peserta Workshop Program Aksi Seribu Hari Pertama Kehidupan (ASHAR)	100 orang	100 orang
				Peserta Workshop Program Bersih Lingkungan dan Sanitasi (BERLIAN)	60 orang	60 Orang
6	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya kualitas rencana pembangunan prasarana wilayah dan SDA	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah	Peserta rakor perencanaan bidang prasarana	300 Orang	300 Orang
				Peserta rakor perencanaan bidang perumahan dan sanitasi	300 Orang	300 Orang
			Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan SDA	Leaflet Geopark Rinjani yang dicetak	500 Lembar	500 Lembar
				Buku saku Geopark Rinjani yang dicetak	500 Buku	500 Buku
				Peserta seminar Geopark Rinjani sebagai Geopark Dunia	75 Orang	75 Orang
				Peserta seminar Penyusunan Finalisasi Ranperda KSP Agropolitan Alas Utan	60 orang	60 Orang
				Peserta sosialisasi Geopark Rinjani sebagai Geopark Dunia	150 Orang	150 Orang
				Peserta workshop Tambora sebagai Taman Nasional	100 Orang	100 Orang
				Peserta Bimtek SOP Mekanisme Pelaksanaan/ Penyelenggaraan Penataan Ruang	60 orang	60 Orang

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
				URAIAN	TARGET	REALISASI
				Dokumen kajian evaluasi Perda RTRW Provinsi NTB	1 Dokumen	1 Dokumen
				Dokumen KLHS KSP Agropolitan Alas Utan	1 Dokumen	1 Dokumen
				Dokumen Album Peta KSP Agropolitan Alas Utan	1 Dokumen	1 Dokumen
				Dokumen identifikasi bahan - bahan penyusunan Dossier Geopark Nasional Tambora	1 Dokumen	1 Dokumen
				Dokumen finalisasi Dossier Geopark Rinjani menuju Geopark Dunia	1 Dokumen	1 Dokumen
			Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian WISMP II (Water Irrigation System Management Project II)	Peserta Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi WISMP II	40 orang	40 orang
				Peserta Rakor PPMU dan PPIU	50 orang	50 orang
				Peserta Rapat Penyusunan Profil KPI dan Succes Story WISMP II	50 orang	50 orang
				Peserta kegiatan PSETK	35 orang	35 orang
				Peserta Pelatihan TPM Program WISMP II	50 orang	50 orang

2.2.2 Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2015

Dalam anggaran perubahan Tahun 2015 Bappeda Provinsi memperoleh anggaran 2015 BAPPEDA Provinsi NTB mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. **25.237.629.400**, terdiri dari belanja tidak langsung Rp. **8.035.301.060**, dan belanja langsung Rp. **17.202.328.340**.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung BAPPEDA Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp. **8.035.301.060**,-, sampai dengan 30 September 2015 realisasi anggaran sebesar Rp. **5.667.564.739**- atau **70,53 persen**.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Provinsi NTB dialokasikan untuk 11 program dan 44 kegiatan. Alokasi anggaran Belanja Langsung BAPPEDA Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. **17.202.328.340**, sampai dengan 30 September 2015 telah terealisasi sebesar Rp. 7.144.031.067.- atau 41,53 persen.

Peran Bappeda sangat kompleks dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, karena Bappeda melakukan koordinasi perencanaan pada bidang sosial, ekonomi, prasarana wilayah dan tata ruang serta statistik daerah. Sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok untuk membantu Gubernur dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB menuangkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB dalam bentuk program dan kegiatan. Pada tahun 2015, melalui APBD Perubahan terdapat 11 program dengan 43 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda.

Secara garis besar capaian kinerja dari keseluruhan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III (September 2015) dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun anggaran 2015, Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat mengelola anggaran sebesar Rp. 25.237.629.400,- dimana realisasi keuangan sampai dengan bulan September telah mencapai 50,76 % atau Rp. 12.811.595.860,- dan realisasi fisik sebesar 52,40 %. Dengan memaksimalkan sumber daya yang telah tersedia, Bappeda berkomitmen untuk mendukung program pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan serta meningkatkan posisi IPM NTB. Melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 Bappeda melaksanakan 2 urusan yaitu urusan perencanaan pembangunan dan urusan statistik dengan masing – masing program berjumlah 10 program pada urusan perencanaan pembangunan dan 1 program di urusan statistik.

Dari 11 program dan 44 kegiatan yang dilaksanakan terdapat beberapa yang masih berada dibawah 50%. Program pertama yaitu Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan yang menjadi perhatian adalah kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan realisasi fisik sebesar 28,39% dan keuangan 28,39%, anggaran akan digunakan untuk operasional surat menyurat untuk dua bulan kedepan dan mencetak map Bappeda. Kegiatan kedua yaitu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian fisik dan keuangan sebesar 29%, hal ini disebabkan belum direalisasinya belanja lampu sorot. Pada kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terdapat beberapa item yang masih dalam proses karena masuk dalam anggaran perubahan antara lain belanja cinderamata, mesin sidik jari, kursi tunggu bahan stainless, rak TV, buffet, AC , PC, Laptop dan scanner.

Pada program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kegiatan yang serapannya dibawah 50% seperti Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor serta pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor merupakan kegiatan operasional dimana anggaran digunakan sebagai persediaan untuk bulan

Oktober sampai dengan Desember 2015. Sedangkan pada kegiatan Pembinaan mental dan fisik aparatur dalam program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdapat kegiatan outbond yang belum dilaksanakan yang menggunakan jasa event organizer.

Dalam program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan Koordinasi perencanaan bidang ekonomi terdapat item kegiatan Rapat Koordinasi Bumdes yang baru 1 kali dilaksanakan dan akan dilaksanakan kembali diakhir tahun sehingga realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 43,35%. Sedangkan kegiatan Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan DBHCHT akan dilakukan FGD di akhir November setelah review PMK dari Dirjen Keuangan diterbitkan.

Kegiatan pada program Perencanaan Sosial dan Budaya yaitu kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan Koordinasi perencanaan pembangunan sosial bidang Kesra secara fisik masih dalam tahap proses, seperti penyusunan penyalarsan pembangunan sosial dan Pergub Bale Mediasi yang sudah disusun dan disosialisasikan namun honorarium tim belum terealisasi serta Perda pemerataan air bersih masih dalam tahap pembahasan dengan DPRD sehingga honorarium tim juga belum terealisasi begitu juga dengan belanja cetak Perda.

Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam secara keuangan baru terealisasi 23,84% dan fisik sebesar 23,84%, hal ini disebabkan karena penyusunan Dokumen Road Map Air Bersih Provinsi NTB pada kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah masih dalam proses lelang di ULP pada Biro AP, dan Raperda KSP Alas Utan yang dilaksanakan pada kegiatan Koordinasi perencanaan tata ruang dan SDA masih dalam proses pembahasan dan konsultasi peta akan dilakukan diawal November. Pada kegiatan Koordinasi pembinaan dan pengendalian WISMP II anggaran belum terserap maksimal karena terdapat 2 item kegiatan yang akan dilaksanakan pada akhir Oktober dan awal November 2015, yaitu workshop penyusunan program KPI serta workshop penyusunan profil KPI dan success story WISMP II.

Pada urusan statistik, melalui kegiatan Pengolahan data dan pelayanan informasi daerah telah selesai dilaksanakan survey IC dan kajian mengenai arus barang di Provinsi NTB dan yang masih dalam proses adalah kajian mengenai program unggulan dan kemiskinan perkotaan. Seluruh item kegiatan tersebut dilaksanakan secara swakelola sehingga untuk pembayaran harus menunggu terbitnya SK Gubernur yang direncanakan selesai pada bulan Oktober

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan kegiatan Bappeda Provinsi NTB s/d bulan September 2015 disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sampai dengan Tahun berjalan (30 September 2015)

KODE REK.PROG/KEG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH ANGGARAN (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN		
		Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)		s.d 30 September 2015		
					KEUANGAN		Fisik (%)
					(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.01	BAPPEDA PROVINSI NTB.			25.237.629.400	12.811.595.860	50,76	52,40
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			8.035.301.060	5.667.564.793	70,53	70,53
	BELANJA LANGSUNG			17.202.328.340	7.144.031.067	41,53	41,53
1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6.326.530.640	3.649.202.649	57,68	57,68
1.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya layanan surat menyurat	Kelancaran administrasi perkantoran meningkat	4.950.000	4.680.000	94,55	94,55
1.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Meningkatnya Kelancaran administrasi perkantoran	493.620.000	292.380.166	59,23	59,23
1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Kelancaran administrasi perkantoran	119.194.000	67.241.000	56,41	56,41
1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan dan bahan pembersih kantor	Terciptaya lingkungan kerja yang sehat dan nyaman	213.052.000	127.895.000	60,03	60,03
1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Meningkatnya Kelancaran administrasi perkantoran	235.000.000	131.976.000	56,16	56,16
1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Kelancaran administrasi perkantoran	57.000.000	16.185.000	28,39	28,39
1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komorponen instalasi dan penerangan listrik bangunan kantor	Terfasilitasinya sumber penerangan dan peralatan listrik gedung kantor	20.000.000	5.800.000	29,00	29,00
1.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya Kelancaran administrasi perkantoran	592.430.000	155.548.400	26,26	26,26
1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Kelancaran administrasi perkantoran	155.000.000	81.605.900	52,65	52,65
1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dokumen kebijakan strategis	1.000.825.250	615.016.040	61,45	61,45
1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran	Meningkatnya Kelancaran administrasi perkantoran	2.577.500.000	1.508.150.000	58,51	58,51

KODE REK.PROG/KEG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH ANGGARAN (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN		
					s.d 30 September 2015		
		Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)		KEUANGAN		Fisik (%)
					(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.01 . 01 . 20	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Dokumen kebijakan strategis	857.958.490	642.725.143	74,91	74,91
1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.189.734.000	751.145.789	34,30	34,30
1.06.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya fasilitas kendaraan operasional	Meningkatnya mobilitas dalam mendukung pelaksanaan tugas	878.300.000	448.918.400	51,11	51,11
1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala	Umur fungsional gedung kantor meningkat	552.500.000	4.200.000	0,76	0,76
1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Umur fungsional kendaraan dinas/operasional meningkat	603.934.000	256.563.889	42,48	42,48
1.06.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Umur fungsional perlengkapan gedung kantor meningkat	60.000.000	22.167.500	36,95	36,95
1.06.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan kantor	Umur fungsional peralatan kantor meningkat	95.000.000	19.296.000	20,31	20,31
1.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			295.520.000	8.275.000	2,80	2,80
1.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya rapat koordinasi regional Jabatan Fungsional Perencana (JFP) - Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur - Tersusunnya dokumen kajian dan mekanisme kerja para pemangku Jabatan Fungsional Perencana (JFP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pemahaman peserta rapat kerja Jabatan Fungsional Perencana (JFP) - Kemampuan intelektual aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal bertambah - Dokumen kajian dan mekanisme kerja para pemangku Jabatan Fungsional Perencana (JFP) 	187.200.000	0	0,00	0,00
1.06.01 . 05 . 04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terbinanya mental dan fisik aparatur	Kesehatan mental dan fisik aparatur meningkat	108.320.000	8.275.000	7,64	7,64
1.06.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			35.700.000	35.400.000	99,16	100,00
1.06.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda Provinsi NTB Tahun 2014	Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda Provinsi NTB Tahun 2014	35.700.000	35.400.000	99,16	100,00
1.06.01 . 15	Program Pengembangan Data / Informasi			152.620.000	33.048.350	21,65	60,58
1.06.01 . 15 . 01	Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Tematik Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Poto Tano - Peta Spasial Potensi Wilayah NTB yang mutakhir - Tersusunnya SIG Usaha Ternak Sapi dan Kerbau di NTB 	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang aktual dan relevan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial, serta tata ruang dan prasarana	117.750.000	31.048.350	26,37	64,96

KODE REK.PROG/KEG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH ANGGARAN (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN		
					s.d 30 September 2015		
		Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)		KEUANGAN		Fisik (%)
					(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.01 . 15 . 05	Penyusunan Profile Daerah	- Tersedianya buku Saku Informasi Daerah - Tersedianya Buku Profil Daerah	Tersedianya informasi daerah Provinsi NTB	34.870.000	2.000.000	5,74	45,81
1.06.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan			703.930.000	206.605.000	29,35	65,00
1.06.01 . 16 . 03	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha / Lembaga	- Tersusunnya data sekunder, data statistik sebagai dokumen pendukung perencanaan pembangunan - Terlaksananya rapat koordinasi Kebijakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah - Terlaksananya rapat koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah - Terlaksananya rapat Evaluasi Ketersediaan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	- Buku NTB Dalam Angka 2014 - Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB tahun 2014 - Buku Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Buku Analisis Indeks Pembangunan Regional (IPR) - Buku Analisis Daya Saing Daerah Provinsi NTB 2015	703.870.000	206.605.000	29,35	65,00
1.06.01 . 21	Program Perencanaan Pembanguna Daerah			2.657.411.000	1.434.938.950	54,00	60,23
1.06.01 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	- Terselenggaranya Rapat Kerja Kepala Bappeda se Provinsi NTB Tahun 2015 - Terselenggaranya Forum SKPD Provinsi NTB - Terselenggaranya Kegiatan Sarasehan Pembangunan NTB Tahun 2016 - Terlaksananya kegiatan pelatihan Perencanaan Pembangunan	- Laporan pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Bappeda se Provinsi NTB Tahun 2015 - Laporan pelaksanaan Forum SKPD Provinsi NTB - Laporan pelaksanaan Sarasehan Pembangunan NTB Tahun 2016 - Meningkatnya pemahaman peserta pelatihan perencanaan pembangunan	416.721.000	165.821.000	39,79	39,79
1.06.01 . 21 . 08	Penyusunan Rancangan RKPD	- Tersusunnya Dokumen RKPD Provinsi NTB Tahun 2016 - Tersusunnya Dokumen RKPD Perubahan Provinsi NTB Tahun 2015	- Dokumen RKPD Provinsi NTB Tahun 2016 - Dokumen RKPD Perubahan Provinsi NTB Tahun 2015	183.050.000	93.670.000	51,17	70,75
1.06.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya penyelenggaraan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD Provinsi NTB Tahun 2015	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	595.200.000	554.670.000	93,19	93,19
1.06.01 . 21 . 11	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Bappeda Provinsi NTB Tahun 2014	Buku Laporan Kinerja Pemerintah Bappeda Provinsi NTB Tahun 2014	50.125.000	45.325.000	99,33	100,00

KODE REK.PROG/KEG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH ANGGARAN (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN		
					s.d 30 September 2015		
		Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)		KEUANGAN		Fisik (%)
					(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.01 . 21 . 12	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersusunnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2014	- Terinformasikan-nya capaian kinerja pelaksanaan program pembangunan daerah yang akuntabel - Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2014	138.710.000	137.774.000	90,42	100,00
1.06.01 . 21 . 13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	- Dokumen Evaluasi Program Prioritas RPJMD Provinsi NTB Semester I dan II TA. 2015 - Dokumen Sinkronisasi Program Kegiatan APBN dengan APBD TA. 2015 - Dokumen Evaluasi UKP-PPP Triwulan IV TA. 2014 - Rancangan Dokumen pemetaan Program/Kegiatan Prioritas Pendukung dalam rangka Pencapaian 31 Indikator RPJMD Provinsi NTB 2013 - 2018	Terevaluasinya dan terpantaunya program/kegiatan pembangunan daerah	205.605.000	72.565.000	35,29	35,29
1.06.01 . 21 . 14	Penyusunan rancangan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	- Dokumen KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2015 - Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2016	198.000.000	74.930.000	37,84	37,84
1.06.01 . 21 . 15	Penyusunan Dokumen Perencanaan	- Terlaksananya pembahasan/asistensi RKA/DPA Provinsi NTB - Tersusunnya Laporan Tahunan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2014 - Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Bappeda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015 dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016 - Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2015 dan Dokumen Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 - Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2015	- Buku Laporan Tahunan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2014 - Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Bappeda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016 - Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2015 dan Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 - Laporan Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2015	538.450.000	181.224.950	33,66	33,66

KODE REK.PROG/KEG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH ANGGARAN (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN		
					s.d 30 September 2015		
		Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)		KEUANGAN		Fisik (%)
					(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.01 . 21 . 16	Sosialisasi/Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Sosialisasi/Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersosialisasinya/terpublikasinya hasil perencanaan pembangunan daerah	103.500.000	38.859.000	37,54	37,54
1.06.01 . 21 . 21	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersosialisasinya Perda SIPP-PT	Dokumen RPJMD dan RKPD Online	68.250.000	20.200.000	29,60	75,21
1.06.01 . 21 . 22	Sinkronisasi Dokumen RPJMD Provinsi NTB	Terlaksananya Review RPJMD Provinsi NTB dengan RPJMD Kabupaten/Kota	- Laporan review RPJMD Provinsi NTB dengan RPJMD Kabupaten/Kota - Dokumen RPJMD Prov. NTB 2013 - 2018	159.800.000	49.900.000	31,23	89,43
1.06.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			1.269.780.000	300.500.770	23,67	18,61
1.06.01 . 22 . 03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	- Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat - Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan - Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi DBH-CHT	- Dokumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) - Dokumen Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah - Laporan Tahunan DBH-CHT Provinsi NTB	241.600.000	133.300.000	55,17	48,00
		- Terlaksananya bimbingan teknis P3BM - Terlaksananya Rakor Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)	- Tersusunnya kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan dan kebijakan tentang DBH-CHT di Provinsi NTB - Meningkatnya pemahaman tentang P3BM bagi operator di Provinsi NTB - Meningkatnya pemahaman tentang Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)				
1.06.01 . 22 . 04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	- Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan PNP-PISEW, Bumdes, PEL dan Data Base Capaian Target MDGs - Tersusunnya dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika - Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif dan Industri PUD	- Buku Database Capaian Indikator MDGs di Provinsi NTB - Buku Laporan Tahunan Pencapaian MDGs di Provinsi NTB - Dokumen Pelaksanaan KEK Prov.i NTB - Dokumen Rencana Pembangunan Ekonomi Kreatif dan Industri PUD - Dokumen Pelaksanaan Kegiatan PNP-PISEW, Bumdes, PEL dan Data Base Capaian Target MDGs - Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL	265.240.000	120.290.000	45,35	45,35

KODE REK.PROG/KEG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH ANGGARAN (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN		
					s.d 30 September 2015		
		Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)		KEUANGAN		Fisik (%)
					(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.01 . 22 . 10	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dan Focus Group Discussion (FGD) DBHHT - Terlaksananya monitoring dan evaluassi ketentuan di bidang cukai 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan Evaluasi dan Focus Group Discussion (FGD) DBHHT - Terkoordinasinya pelaksanaan ketentuan di bidang cukai 	762.940.000	46.910.770	6,15	6,15
1.06.01 . 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya			469.874.900	119.892.000	25,52	25,52
1.06.01 . 23 . 05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya laporan Penyelarasan Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan - Tersedianya Peraturan Gubernur tentang Bale Mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Kegiatan Sub Bidang Pemerintahan 	196.560.000	4.750.000	2,42	2,42
		<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan Rapat Fasilitasi Peningkatan Capaian Kinerja SKPD - Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Penyelarasan Pembangunan Bidang Sosial - Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Bale Mediasi 					
1.06.01 . 23 . 08	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Dokumen Roadmap Generasi Emas NTB 2025 - Tersedianya Dokumen Gugus Tugas Program PAUDHI - Tersedianya Raperda Pemerataan Akses Air Bersih - Terlaksananya Rapat Koordiansi Program Pemerataan Air Bersih/Air Minum se Provinsi NTB - Terselenggaranya Rapat Penyusunan Raperda Pemerataan Akses Air Bersih - Terlaksananya Rakor Pokja AMPL 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Roadmap Generasi Emas NTB 2015 - Dokumen Gugus Tugas Program PAUDHI - Buku Raperda Pemerataan Akses Air Bersih 	273.314.900	115.142.000	42,13	42,13

KODE REK.PROG/KEG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH ANGGARAN (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN		
					s.d 30 September 2015		
		Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)		KEUANGAN		Fisik (%)
					(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.01 . 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA			2.537.437.800	605.022.559	23,84	23,84
1.06.01 . 24 . 07	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Terkoordinasinya Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Provinsi NTB - Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pelayanan Air Bersih Provinsi NTB 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah Provinsi NTB - Dokumen Identifikasi Pelayanan Air Bersih Provinsi NTB 	376.580.000	41.984.800	11,15	11,15
1.06.01 . 24 . 08	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan SDA	<ul style="list-style-type: none"> - Terkelolanya Sumberdaya Alam di Provinsi NTB - Tersusunnya Perda Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Agropolitan Alasutan - Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan Gas Rumah Kaca (GRK) - Terkoordinasinya pelaksanaan Program Compact Kemakmuran Hijau di NTB - Terselenggaranya Seminar dan Sosialisasi Geopark Rinjani sebagai Geopark Dunia - Terselenggaranya Seminar dan Sosialisasi Geopark Tambora sebagai Geopark Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan BKPRD Provinsi NTB - Perda KSP Agropolitan Alasutan - Meningkatnya pemahaman stakeholder tentang Geopark Rinjani sebagai Geopark Dunia - Meningkatnya pemahaman stakeholder tentang Geopark Tambora sebagai Geopark Nasional - Terbentuknya Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Program Compact Kemakmuran Hijau di NTB - Rencana Induk Pengembangan Geopark Rinjani 	930.375.000	118.110.000	12,69	12,69
1.06.01 . 24 . 10	Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian WISMP II (Water Irrigation System Management Project II)	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pelatihan Penguatan Komisi Pengelola Irigasi (KPI) Program WISMP II - Terlaksananya Workshop Penyusunan Profil KPI dan Success Story Program WISMP II - Terlaksananya Workshop Penyusunan Program Terpadu Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Program WISMP II - Terlaksananya Pelatihan TPM Program WISMP II 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah Provinsi NTB - Meningkatnya pemahaman peserta tentang Penguatan Komisi Pengelola Irigasi (KPI) Program WISMP II - Meningkatnya pemahaman peserta tentang Penyusunan Profil KPI dan Success Story Program WISMP II - Meningkatnya pemahaman peserta tentang Penyusunan Program Terpadu Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Program WISMP II - Meningkatnya pemahaman TPM tentang Program WISMP II 	1.230.482.800	444.927.759	36,16	36,16

KODE REK.PROG/KEG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH ANGGARAN (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN		
					s.d 30 September 2015		
		Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)		KEUANGAN		Fisik (%)
					(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.23.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			563.790.000	0	0	0
1.23.15.04	Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Terkelolanya Pusat Data Daerah (Bale ITE) Prinsi NTB - Tersusunnya Kajian tentang masalah Pembangunan di NTB 	Meningkatnya ketersediaan dan pelayanan drmata dan informasi yang aktual, akurat dan relevan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penyebarluasan informasi	563.790.000	0	0	0
	JUMLAH			25.273.629.400	12.811.595.860	50,76	52,40

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi NTB

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumber daya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Untuk mencapai visi dan misi Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bappeda dengan program tingkat Kabupaten/Kota menjadi mutlak.

Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perda Provinsi NTB Nomor 8 Tahun, 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat hendaknya didukung oleh ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif ditandai dengan peningkatan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholders), pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa/kelurahan/kecamatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mengikuti temu

aspirasi dalam mekanisme Musrenbang yang telah menjadi agenda tetap tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPD dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya kualitas pendampingan perencanaan pembangunan di Kabupaten/Kota oleh BAPPEDA dan SKPD Teknis terkait yang dilaksanakan baik melalui Musrenbang Kabupaten/Kota, Pra Musrenbang Provinsi, maupun Musrenbang Provinsi.
5. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dengan disosialisasikannya Sistem Informasi Musrenbang baik melalui media cetak maupun elektronik (RKPD online).
6. Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan antara lain:

1. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan;
2. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
4. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
5. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;

Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi NTB

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara yang salah satunya adalah melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kebijakan dalam konteks organisasional Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat dirumuskan dalam Rancangan Renstra Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tidak terlepas dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 2018. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018, maka strategi - strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang akan diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan aparatur;
2. Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan;
3. Mendayagunakan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan untuk perencanaan;
4. Meningkatkan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah;
5. Mensinergikan perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan;
6. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berbasis tata ruang;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2016

RKPD Provinsi NTB tahun 2016 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Bappeda Tahun 2009 – 2013 dan dilanjutkan dalam Renstra Bappeda 2013 - 2018.

Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal RKPD tidak terdapat perbedaan yang signifikan, dimana program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rancangan Renstra Bappeda Tahun 2013 – 2018 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di Bappeda yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun. Dalam rangka mempersiapkan kegiatan tahun 2016 terjadi perubahan jumlah program/kegiatan yang

dilaksanakan, yang semula dalam DPA murni sebanyak 11 program dengan 42 kegiatan, dalam rencana kerja perubahan direncanakan menjadi 11 program dan 43 kegiatan. Dalam Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2015 terdapat penambahan jumlah urusan wajib, penambahan jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penambahan urusan wajib yaitu urusan wajib statistik yang merupakan tupoksi Bappeda Provinsi NTB sesuai dengan RPJMD 2014 – 2018, sehingga dalam Rencana Kerja Perubahan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2015 Bappeda Provinsi NTB direncanakan akan melaksanakan dua urusan wajib yaitu urusan perencanaan dan urusan statistik. Disamping penambahan urusan terjadi juga penambahan program dan kegiatan yaitu program Program pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Daerah. Selain itu terdapat juga penambahan kegiatan dalam Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yaitu Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT. Disamping penambahan jumlah urusan, program maupun kegiatan terdapat pula pengurangan program dan kegiatan yaitu Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan "Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh". Alasan ditundanya pelaksanaan program/kegiatan ini karena kegiatan tersebut sudah terakomodir dalam Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan SDA. Dengan demikian dalam Rencana Kerja Perubahan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2015 Bappeda Provinsi NTB akan melaksanakan dua urusan, yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan dengan 10 program dan 42 kegiatan serta urusan statistik dengan satu program dan satu kegiatan.

Review rancangan awal RKPD Perubahan Provinsi NTB tahun 2015 terhadap Rencana Kerja Perubahan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2015 disajikan dalam tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Review Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2016
Terhadap Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016

Kode	Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2016					Rancangan Awal Renja Bappeda Tahun 2016				
	Urusan/ program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Urusan/program/ Kegiatan	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)	
			Tolok Ukur	Target Pencapaian			Tolok Ukur	Target Pencapaian		
05	Urusan Penataan Ruang				1.052.548.500	Urusan Penataan Ruang			1.052.548.500	
15	Program Perencanaan Tata Ruang				1.052.548.500	Program Perencanaan Tata Ruang			1.052.548.500	
04	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah		Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang disusun	2 Dokumen	675.850.000	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang disusun	2 Dokumen	675.850.000	
16	Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah yang disusun	1 Dokumen	376.698.500	Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah yang disusun	1 Dokumen	376.698.500	
06	Urusan Perencanaan Pembangunan					Urusan Perencanaan Pembangunan			16.744.538.340	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Terwujudnya pengelolaan naskah yang baik - Terwujudnya layanan sarana prasarana kantor	Pelayanan administrasi yang terselenggara	12 kegiatan	5.398.633.600	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara	12 kegiatan	5.398.633.600	
01	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat yang terlayani	125 surat	34.590.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani	125 surat	34.590.000	
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Persentase penyediaan jasa perkantoran	100 %	680.940.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase penyediaan jasa perkantoran	100 %	680.940.000	
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Persentase jasa administrasi keuangan	100 %	117.145.800	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase jasa administrasi keuangan	100 %	117.145.800	
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Persentase jasa kebersihan kantor yang disediakan	100 %	229.146.600	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase jasa kebersihan kantor yang disediakan	100 %	229.146.600	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah paket alat tulis kantor	1 Tahun	17.462.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket alat tulis kantor	1 Tahun	17.462.000	
11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket blangko	1 Tahun	15.000.000	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket blangko	1 Tahun	15.000.000	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah gedung yang disediakan instalasi listrik	1 unit gedung kantor	22.537.700	Penyediaan kom-ponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah gedung yang disediakan instalasi listrik	1 unit gedung kantor	22.537.700	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor	5 unit	582.516.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor	5 unit	582.516.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Rancangan Awal Renja Bappeda Perubahan			
	Urusan/ program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Urusan/program/ Kegiatan	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)
			Tolok Ukur	Target Pencapaian			Tolok Ukur	Target Pencapaian	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman kantor	12 bulan	258.391.476	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman kantor	12 bulan	155.000.000
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah rapat dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	75 kali	581.556.600	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	75 kali	1.000.825.250
19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran		Persentase penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	126 orang	2.606.222.424	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Persentase penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	100 %	2.577.500.000
20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	68 kali	253.125.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	68 kali	875.655.990
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang memadai	Peralatan kantor yang terpelihara	4 kegiatan	1.014.175.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peralatan kantor yang terpelihara	4 kegiatan
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah bangunan gedung/kantor yang terpelihara	1 unit gedung kantor	259.875.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung/kantor yang terpelihara	1 unit gedung kantor	259.875.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	81 unit	566.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	81 unit	566.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	75 unit	62.700.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	75 unit	62.700.000
30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor		Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	224 unit	125.600.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	224 unit	125.600.000
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tersedianya aparat yang mumpuni dan berbudi pekerti luhur	Persentase aparat yang telah mengikuti pelatihan	2 kegiatan	265.179.500	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang telah mengikuti pelatihan	2 kegiatan
01	Pendidikan dan pelatihan formal		Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 kali	176.009.500	Pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 kali	176.009.500
04	Pembinaan mental dan fisik aparatur		Jumlah aparatur yang dibina mental dan fisik	115 orang	89.170.000	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah aparatur yang dibina mental dan fisik	115 orang	89.170.000
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya layanan keuangan yang cepat, transparan dan laporan keuangan yang bertanggung-jawab	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun	1 kegiatan	43.270.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun	1 kegiatan	43.270.000
04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Dokumen keuangan akhir tahun yang tersedia	1 dokumen	43.270.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen keuangan akhir tahun yang tersedia	1 dokumen	43.270.000

Kode	Rancangan Awal RKPd Perubahan					Rancangan Awal Renja Bappeda Perubahan			
	Urusan/ program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Urusan/program/ Kegiatan	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)
			Tolok Ukur	Target Pencapaian			Tolok Ukur	Target Pencapaian	
07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah				53.900.000	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			53.900.000
01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah		Manajemen pengelolaan aset/barang milik daerah yang dilaksanakan	1 Tahun	53.900.000	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Manajemen pengelolaan aset/barang milik daerah yang dilaksanakan	1 Tahun	53.900.000
15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	- Terkelolanya basis data spasial daerah	Data informasi yang disusun	2 kegiatan	227.940.000	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Data informasi yang disusun	2 kegiatan	227.940.000
01	Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	- Tersebar nya data dan informasi pembangunan berbasis web	Jumlah dokumen spasial dan non-spasial yang disusun	4 dokumen	188.040.000	Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah dokumen spasial dan non-spasial yang disusun	4 dokumen	188.040.000
05	Penyusunan Profile Daerah		Jumlah dokumen informasi yang disusun	2 dokumen	39.900.000	Penyusunan Profile Daerah	Jumlah dokumen informasi yang disusun	2 dokumen	39.900.000
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Terwujudnya pola perencanaan yang partisipatif dan akurat	Perencanaan yang dilaksanakan	8 kegiatan	3.575.962.000	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan yang dilaksanakan	8 kegiatan	3.575.962.000
21.01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	- Tersedianya dokumen renstra, renja SKPD dan LAKIP yang berkualitas	Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan dan jumlah dokumen yang disusun	5 kegiatan 1 Dokumen	642.661.000	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan dan jumlah dokumen yang disusun	5 kegiatan 1 Dokumen	642.661.000
21.08	Penyusunan Rancangan RKPd	- Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, selaras antar sektor dan antar wilayah	Dokumen RKPd yang disusun	2 dokumen	283.485.000	Penyusunan Rancangan RKPd	Dokumen RKPd yang disusun	2 dokumen	283.485.000
21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	- Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Kegiatan Musrenbang RKPd yang dilaksanakan	1 dokumen	738.640.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	Kegiatan Musrenbang RKPd yang dilaksanakan	1 dokumen	738.640.000
21.11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)		Dokumen laporan kinerja pemerintah daerah yang disusun	1 dokumen	58.750.000	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)	Dokumen laporan kinerja pemerintah daerah yang disusun	1 dokumen	58.750.000
21.12	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)		Dokumen LKPJ yang disusun	1 dokumen	174.450.000	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ yang disusun	1 dokumen	174.450.000
21.13	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah		Dokumen hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian	2 dokumen	296.100.000	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian	2 dokumen	296.100.000
21.14	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS		Dokumen KUA dan PPAS murni dan perubahan yang disusun	2 dokumen	181.077.000	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS murni dan perubahan yang disusun	2 dokumen	181.077.000
21.15	Penyusunan Dokumen Perencanaan		Dokumen perencanaan yang disusun	7 dokumen	752.150.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen perencanaan yang disusun	7 dokumen	752.150.000
21.16	Sosialisasi/Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan	22 kali	79.000.000	Sosialisasi/Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan	22 kali	79.000.000

Kode	Rancangan Awal RKPd Perubahan					Rancangan Awal Renja Bappeda Perubahan			
	Urusan/ program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Urusan/program/ Kegiatan	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)
			Tolok Ukur	Target Pencapaian			Tolok Ukur	Target Pencapaian	
21.21	Evaluasi Dokumen Perencanaan		Dokumen Perencanaan Hasil Evaluasi	1 Dokumen	274.253.000	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pemb. Daerah	Dokumen Perencanaan Hasil Evaluasi	1 Dokumen	274.253.000
21.22	Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB		Dokumen RPJMD Provinsi NTB Hasil Revisi	1 Dokumen	95.396.000	Sinkronisasi Dokumen RPJMD Provinsi NTB	Dokumen RPJMD Provinsi NTB Hasil Revisi	1 Dokumen	95.396.000
22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	- Terwujudnya rencana pemanfaatan SDA potensial daerah secara berkelanjutan - Terwujudnya rencana pengembangan industri berbasis agro dan pariwisata (industri kreatif)	Dokumen perencanaan	8 dokumen	1.396.653.000	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Dokumen perencanaan	8 dokumen	1.396.653.000
22.03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat yang disusun	4 dokumen	255.045.500	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat yang disusun	4 dokumen	255.045.500
22.05	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi		Dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun	4 dokumen	378.667.500	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun	4 dokumen	378.667.500
22.10	Sosialisasi Ketentuan di Buidang Cukai dan DBHCHT		Sosialisasi Ketentuan di Buidang Cukai dan DBHCHT yang dilaksanakan	1 Kegiatan	762.940.000	Sosialisasi Ketentuan di Buidang Cukai dan DBHCHT	Sosialisasi Ketentuan di Buidang Cukai dan DBHCHT yang dilaksanakan	1 Kegiatan	762.940.000
23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya		- Terwujudnya rencana peme-rintah yang bersih dan melayani - Tersedianya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan pelayanan pendidikan, kesehatan dan PMKS yang baik		4 dokumen	789.910.000	Program Perencanaan Sosial dan Budaya		4 dokumen
23.08	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Subbid Kesra	Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan sosial bidang Kesra yang diselenggarakan		2 dokumen	509.086.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Subbid Kesra	Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan sosial bidang Kesra yang diselenggarakan	2 dokumen	509.086.000
23.09	Penguatan Lembaga Mediasi	Jumlah kegiatan sosialisasi Penguatan Mediasi Adat yang dilaksanakan		1 Kegiatan	174.900.000		Jumlah kegiatan sosialisasi Penguatan Mediasi Adat yang dilaksanakan	1 Kegiatan	174.900.000
23.10	Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi	Dokumen Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi yang disusun		2 Dokumen	103.924.000		Dokumen Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi yang disusun	2 Dokumen	103.924.000
24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya alam	- Terwujudnya konektivitas antar wilayah, layanan listrik memadai, air lestari dan akses telekomunikasi untuk semua	Dokumen Perencanaan	4 dokumen	1.841.898.800	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya alam	Dokumen Perencanaan	4 dokumen	1.841.898.800
24.02	Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Dokumen Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang disusun	4 dokumen	814.690.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang prasarana wilayah	Dokumen Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang disusun	4 dokumen	814.690.000

Kode	Rancangan Awal RKPD Perubahan				Rancangan Awal Renja Bappeda Perubahan				
	Urusan/ program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Urusan/program/ Kegiatan	Indikator Keluaran		Pagu Anggaran (Rp.)
			Tolok Ukur	Target Pencapaian			Tolok Ukur	Target Pencapaian	
24.07	Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	- Tersedianya rencana pengelolaan hutan dan lahan - Tersedianya rencana mitigasi dan adaptasi bencana	Dokumen Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah yang disusun	2 dokumen	353.850.000	Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang dan SDA	Dokumen Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah yang disusun	2 dokumen	353.850.000
24.10	Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian NTB-WISMP II		Kegiatan koordinasi pembinaan dan pengendalian WISMP II yang diselenggarakan	4 kegiatan	673.358.800	Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian NTB-WISMP II	Kegiatan koordinasi pembinaan dan pengendalian WISMP II yang diselenggarakan	4 kegiatan	673.358.800
23	Urusan Statistik				1.598.688.000	Urusan Statistik			1.598.688.000
15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Terkelolanya basis data spasial daerah	Data informasi yang disusun	2 Dokumen	1.598.688.000	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Data informasi yang disusun	2 Dokumen	1.598.688.000
15.02	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah		Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah yang disusun	5 Dokumen	879.625.000		Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah yang disusun	5 Dokumen	879.625.000
15.05	Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Daerah		Pengolahan data dan pelayanan informasi yang disusun	4 Dokumen	719.063.000	Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Daerah	Pengolahan data dan pelayanan informasi yang disusun	4 Dokumen	719.063.000
	JUMLAH				17.256.758.340				17.256.758.340

2.5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bappeda Provinsi NTB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Gubernur NTB dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk untuk rencana pembangunan daerah. Untuk itu telah disusun visi dan misi Bappeda Provinsi NTB yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA Provinsi NTB dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, BAPPEDA dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam menjaring usulan dari pemangku kepentingan tersebut, Bappeda Provinsi NTB selaku unsur perencana mengadakan beberapa mekanisme antara lain dengan melalui Musrenbang mulai dari tingkat Kabupaten sampai Provinsi. Usulan-usulan tersebut ditampung dan ditelaah manfaatnya dan dianalisis berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk dituangkan menjadi RKPD dan Renja SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah "**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**"

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, perlu diimplementasikan melalui tujuh misi Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Masyarakat maju, berkembang dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Bangsa berdayasaing.
6. Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan member rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi reformasi sistim penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia pintar, Indonesia sehat, Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera.
6. Akan meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Akan memeperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, sembilan agenda (Nawa Cita) yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama, yaitu:

1. **Dimensi Pembangunan Manusia** dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar; sektor kesehatan dengan melaksanakan Program I Indonesia Sehat; perumahan rakyat; melaksanakan revolusi karakter bangsa; memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia; dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita.
2. **Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan** dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan iptek. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.
3. **Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan** dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.
4. **Kondisi Perlu** yang memuat program untuk peningkatan kepastian penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi perlu ini merupakan penjabaran Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat.

Sedangkan Visi pembangunan Provinsi NTB sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah **"MEWUJUDKAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA"**. Visi tersebut diimplementasikan melalui 7 (tujuh) misi, yaitu :

- a. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter.
- b. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
- c. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.
- d. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berdayasaing.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah.
- f. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis tata ruang.
- g. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan berbagai capaian pembangunan Provinsi NTB tahun 2015, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2014, maka arah kebijakan pembangunan daerah provinsi NTB pada tahun 2016 difokuskan pada upaya penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappeda Provinsi NTB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Gubernur NTB dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk untuk rencana pembangunan daerah. Untuk itu telah disusun visi dan misi Bappeda Provinsi NTB yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam Renstra Bappeda 2013 – 2018 telah dirumuskan visi Bappeda Provinsi NTB 2013 – 2018 adalah yaitu **"MENJADI LEMBAGA PERENCANA YANG ANDAL"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Bappeda. Misi Bappeda Provinsi NTB tahun 2013 – 2018 Bappeda Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur.
2. Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir dan akuntabel untuk perencanaan pembangunan.
3. Mendayagunakan hasil monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.
5. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan sosial dasar daerah.
6. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah yang sinergis berbasis tata ruang

Sebagai penjabaran atau penerapan dari misi tersebut, Bappeda Provinsi NTB menetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan derivasi dari masing – masing tujuan. Sebagai pernyataan dari misi dan tujuan menjadi hasil akhir yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan dari misi Bappeda Provinsi NTB antara lain :

- Misi 1 Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur, dengan tujuan:
 - 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kantor
 - 2. Meningkatkan akuntabilitas keuangan
 - 3. Meningkatkan kualitas rencana dan pelaporan.
- Misi 2 Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir dan akuntabel
 - 1. Mendayagunakan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah.
 - 2. Meningkatkan akurasi dan kemutakhiran data pembangunan daerah.
- Misi 3 Mendayagunakan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan dalam perencanaan pembangunan
 - 1. Meningkatkan kualitas dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS dan LKPJ.
 - 2. Meningkatkan kemanfaatan laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan.
- Misi 4 Meningkatkan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.
 - 1. Mengembangkan perekonomian dengan berbasis agrikultur dan pariwisata.
- Misi 5 Meningkatkan kualitas rencana pembangunan sosial dasar daerah.
 - 1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.
 - 2. Meningkatkan kuantitas sarana prasarana dan kualitas pelayanan sosial dasar.
- Misi 6 Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah yang sinergis berbasis tata ruang
 - 1. Meningkatkan kuantitas sarana prasarana dan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah.
 - 2. Memantapkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan bencana alam.

Tujuan dan Sasaran Jagka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 – 2018 dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jagka Menengah
Pelayanan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 1 Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur		
Meningkatkan kualitas pelayanan kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya pengelolaan naskah yang baik - Terwujudnya layanan sarana prasarana kantor - Tersedianya kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang memadai - Tersedianya aparat yang mumpuni dan berbudi pekerti luhur - 	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu tindak lanjut - Pertumbuhan layanan sarana prasarana kantor - Peralatan kantor yang terpelihara - Persentase aparat yang telah mengikuti pelatihan
Meningkatkan akuntabilitas keuangan	Terwujudnya layanan keuangan yang cepat, transparan dan laporan keuangan yang bertanggungjawab	Penyerapan anggaran
Meningkatkan kualitas rencana dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya pola perencanaan yang partisipatif dan akurat - Tersedianya dokumen renstra, renja SKPD dan LAKIP yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase usulan masyarakat dan Kab/Kota yang diakomodir dalam rencana pembangunan - Penyelesaian dokumen/laporan : <ul style="list-style-type: none"> • DPA SKPD • LAKIP
Misi 2 Menyediakan Data dan Informasi yang Akurat, Mutakhir dan Akuntabel		
Mendayagunakan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Terkelolanya basis data spasial daerah - Tersebaranya data dan informasi pembangunan berbasis web 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan data spasial daerah - Masyarakat yang mengakses layanan NTB online (RKPD Online, NTB Satu Data)
Meningkatkan akurasi dan kemutakhiran data pembangunan daerah	Tersedianya data yang akurat, selaras, mutakhir dan akuntabel	Data pembangunan daerah yang diselaraskan
Misi 3 Mendayagunakan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Dalam Perencanaan Pembangunan		
Meningkatkan kualitas dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS dan LKPJ	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan

	pertanggungjawaban yang berkualitas	yang berprestasi ditingkat nasional - Ketepatan penyelesaian dokumen/laporan : • KUA/PPAS • LKPJ
Meningkatkan kemanfaatan laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil evaluasi program pembangunan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 4 Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Ekonomi Daerah		
Mengembangkan perekonomian dengan berbasis agrikultur dan pariwisata.	- Terwujudnya rencana pemanfaatan SDA potensial daerah secara berkelanjutan - Terwujudnya rencana pengembangan industri berbasis agro dan pariwisata (industri kreatif)	- Persentase pemanfaatan SDA potensial daerah - Persentase pengembangan industri daerah
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Sosial Dasar Daerah		
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya rencana pemerintah yang bersih dan melayani	Persentase peningkatan layanan pemerintah yang bersih
Meningkatkan kuantitas sarana prasarana dan kualitas pelayanan sosial dasar	Tersedianya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan pelayanan pendidikan, kesehatan serta PMKS yang baik	Persentase penyediaan kebutuhan sosial dasar
Misi 6 Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Daerah yang Sinergis Berbasis Tata Ruang		
Meningkatkan kuantitas sarana prasarana dan kualitas pelayanan infrastruktur daerah berbasis tata ruang	Terwujudnya konektivitas antar wilayah, layanan listrik memadai, air lestari dan akses telekomunikasi untuk semua	Persentase kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah
Memantapkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan bencana alam	- Tersedianya rencana pengelolaan hutan dan lahan - Tersedianya rencana mitigasi dan adaptasi bencana	- Persentase sinergitas pemanfaatan tata ruang wilayah - Persentase penanggulangan korban bencana

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan visi dan misi Provinsi NTB, pada dasarnya kegiatan Bappeda Provinsi NTB adalah sebagai "pengarah" setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 disusun sebagai upaya untuk

mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, di samping melaksanakan program dan kegiatan rutin SKPD, pada tahun 2016 Bappeda Provinsi NTB dalam Rencana Kerja Tahun 2016 merencanakan akan melaksanakan tiga urusan wajib yaitu urusan penataan ruang, urusan perencanaan dan urusan statistik. Dari ketiga urusan tersebut dibreakdown ke dalam 12 program dan 46 kegiatan. Gambaran umum program dan kegiatan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

A. Urusan Panataan Ruang, terdiri dari:

1. Program Perencanaan Tata Ruang
 - a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - b. Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah

B. Urusan Perencanaan Pembangunan, terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - i. Penyediaan makanan dan minuman;
 - j. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - k. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran;
 - l. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional;
 - c. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor;
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan:
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal;
 - b. Pembinaan mental dan fisik aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah
6. Program Pengembangan Data Informasi dengan kegiatan:

- a. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program;
 - b. Penyusunan Profil Daerah.
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan:
- a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik;
 - b. Penyusunan rancangan RKPD;
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
 - d. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah;
 - e. Koordinasi penyusunan laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - f. Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - g. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS;
 - h. Penyusunan Dokumen Perencanaan;
 - i. Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - j. Evaluasi Dokumen Perencanaan;
 - k. Penyeragaman Dokumen RPJMD Provinsi NTB.
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan:
- a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
 - b. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi;
 - c. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT
9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan kegiatan:
- a. Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra
 - b. Penguatan Lembaga Mediasi
 - c. Peningkatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA dengan kegiatan:
- a. Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
 - b. Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah
 - c. Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif

C. Urusan Statistik

- 1. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
 - a. Pengumpulan, updating dan analisis data dan statistik daerah
 - b. Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Daerah

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2016
dan Perkiraan Maju Tahun 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	8	9
05	Urusan Penataan Ruang						
15	Program Perencanaan Tata Ruang			2 kegiatan	1.052.548.500	2 kegiatan	1.052.548.500
02	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang disusun	Mataram	2 dokumen	675.850.000	1 dokumen	675.850.000
05	Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah yang disusun	Mataram	1 dokumen	376.698.500	1 dokumen	376.698.500
06	Urusan Perencanaan Pembangunan						
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			12 kegiatan	5.398.633.600		4.790.611.000
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani	Mataram	125 surat	34.590.000	100 surat	8.432.311
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Persentase penyediaan jasa perkantoran	Mataram	100 %	680.940.000	100 %	618.720.793
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase jasa administrasi keuangan	Mataram	100 %	117.145.800	100 %	119.323.219
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase jasa kebersihan kantor yang disediakan	Mataram	100 %	229.146.600	100 %	184.621.677
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket alat tulis kantor	Mataram	1 Tahun	17.462.000	1 Tahun	21.403.764
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket blangko	Mataram	1 Tahun	15.000.000	1 paket	13.115.255
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah gedung yang disediakan instalasi listrik	Mataram	1 gedung	22.537.700	1 gedung	12.478.314

No	program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	8	9
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket/unit peralatan perlengkapan kantor yang disediakan	Mataram	5 unit	582.516.000	1 Paket	42.387.419
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman kantor	Mataram	12 bulan	258.391.476	12 bulan	120.461.581
18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah rapat dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	Jakarta dan provinsi Lainnya serta Luar Negeri	75 kali	581.556.600	75 kali	941.106.098
19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Mataram	126 orang	2.606.222.424	100 %	2.663.387.477
20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	Se - Provinsi NTB	68 kali	253.125.000	68 kali	45.173.093
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			4 kegiatan	1.014.175.000	5 kegiatan	2.411.865.000
05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	Mataram	-	0	1 unit	734.018.598
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung/kantor yang terpelihara	Mataram	1 unit	259.875.000	1 unit	227.065.317
24	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Mataram	81 unit	566.000.000	85 unit	1.358.695.116
26	Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Mataram	75 unit	62.700.000	218 unit	62.057.936
30	Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Mataram	224 unit	125.600.000	100 %	30.028.034

No	program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	8	9
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			2 kegiatan	265.179.500	3 kegiatan	117.481.561
01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan pelatihan formal yang dilaksanakan	Mataram	2 kali	176.009.500	11 orang	78.130.154
02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Paket peraturan perundangan yang disosialisasikan	Mataram	-	0	1 paket	26.979.133
04	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah aparatur yang dibina mental dan fisik	Mataram	115 orang	89.170.000	112 orang	12.372.274
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistim pelaporan capaian kinerja dan Keuangan			1 kegiatan	43.270.000	1 kegiatan	26.273.000
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013	Mataram	1 dokumen	43.270.000	1 Dokumen	26.273.000
07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			1 kegiatan	53.900.000	1 kegiatan	70.000.000
01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Manajemen pengelolaan aset/barang milik daerah yang dilaksanakan	Mataram	1 tahun	53.900.000	1 tahun	70.000.000
15	Program Pengembangan data/Informasi			2 kegiatan	227.940.000	2 kegiatan	270.612.000
01	Pengumpulan; Updating; dan analisis data/ informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah dokumen spasial dan non-spasial yang disusun	Mataram	4 dokumen	188.040.000	3 dokumen	188.527.652
05	Penyusunan Profil Daerah	Dokumen profile daerah	Mataram	2 dokumen	39.900.000	2 Dokumen	82.084.348
18	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			-	0	3 dokumen	591.143.000
	Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Laporan hasil sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Mataram	-	0	1 dokumen/laporan	80.000.000
	Koordinasi dan penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	Dokumen kerjasama dlm penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh yang disepakati	Mataram	-	0	1 dokumen	255.571.500
	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Dokumen rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang disusun	Mataram	-	0	1 dokumen	255.571.500

No	program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	8	9
19	Program perencanaan pengembangan kota - kota menengah dan besar	Dokumen perencanaan		-	0	2 Dokumen	394.096.000
	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Jumlah dokumen permasalahan transportasi	Mataram	-	0	1 dokumen	197.048.000
	Koordinasi perencanaan penanganan pusat - pusat pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat - pusat pendidikan	Mataram	-	0	1 dokumen	197.048.000
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			11 kegiatan	3.575.962.000	8 kegiatan	6.175.789.000
01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan dan jumlah dokumen yang disusun	Mataram	5 kegiatan 1 dokumen	642.661.000	1 Dokumen	1.264.115.312
08	Penyusunan Rancangan RKPD	Dokumen RKPD murni dan perubahan yang disusun	Mataram	2 dokumen	283.485.000	2 Dokumen	150.550.048
09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kegiatan Musrenbang RKPD yang dilaksanakan	Mataram	1 kegiatan	738.640.000	1 Kegiatan	1.729.784.702
11	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	Mataram	1 dokumen	58.750.000	1 Dokumen	51.208.098
12	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ yang disusun	Mataram	1 dokumen	174.450.000	1 Dokumen	703.675.313
13	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian	Mataram	2 dokumen	296.100.000	1 Dokumen	226.714.720
14	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS murni dan perubahan yang disusun	Mataram	2 dokumen	181.077.000	4 Dokumen	288.102.043
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen perencanaan yang disusun	Mataram	7 dokumen	752.150.000	2 Dokumen	979.015.396
16	Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan	Mataram	22 kali	79.000.000	23 kali	138.707.517
18	Evaluasi Dokumen Perencanaan	Evaluasi Dokumen Perencanaan yang disusun	Mataram	1 dokumen	274.253.000	100 %	286.404.411

No	program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	8	9
21	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan	Mataram	-	0	150 buku	375.511.448
22	Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Penyelarasan RPJMD Provinsi NTB dengan RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Mataram	1 dokumen	95.396.000	-	0
22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			8 dokumen	1.396.653.000	8 dokumen	808.142.000
03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat yang disusun	Mataram	4 dokumen	255.045.500	4 Dokumen	395.811.461
04	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun	Mataram	4 dokumen	378.667.500	4 Dokumen	412.330.539
10	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT yang dilaksanakan	Mataram	3 kegiatan	762.940.000	3 kegiatan	762.940.000
23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya			3 kegiatan	787.910.000	3 kegiatan	
08	Perencanaan Pembangunan Sosial Subbid Kesra	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan sosial bidang Kesra yang disusun	Mataram	2 dokumen	509.086.000	2 dokumen	583.003.189
09	Penguatan Lembaga Mediasi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penguatan Lembaga Mediasi yang dilaksanakan	Mataram	1 kegiatan	174.900.000	1 kegiatan	174.900.000
10	Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi	Jumlah pelaporan evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan	Mataram	4 dokumen	103.924.000	4 dokumen	103.924.000
24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya alam			3 kegiatan	1.841.898.800	3 kegiatan	
02	Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disusun	Mataram	4 dokumen	814.690.000	2 dokumen	1.069.199.268
07	Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang disusun	Mataram	2 Dokumen	353.850.000	1 Dokumen	1.374.022.034
10	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Irigasi Partisipatif yang diselenggarakan	Mataram	4 Kegiatan	673.358.800	3 Kegiatan	592.714.698

No	program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	8	9
23	Urusan Statistik						
15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Data informasi yang disusun	Mataram	2 kegiatan	1.598.688.000	2 kegiatan	1.598.688.000
02	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah yang disusun	Mataram	5 Dokumen	879.625.000	5 Dokumen	879.625.000
05	Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Daerah	Pengolahan data dan pelayanan informasi yang disusun	Mataram	4 Dokumen	719.063.000	4 Dokumen	719.063.000
	JUMLAH				17.256.758.340		19.315.013.661

BAB IV PENUTUP

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyarakatkan keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram, dalam satu instansi maupun antarinstansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD, serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran, dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan. Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang semakin meningkat sehingga hasil pembangunan yang diinginkan akan lebih optimal.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB 2013-2018 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunanyang telah dilaksanakan.
3. Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016 berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, dan Rancangan Renstra Bappeda).
5. Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2016, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodir di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
5. Aparatur perencanaan yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang. hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



CHAIRUL MAHSUL
NIP. 19591002 198503 1 010